



Presentasi Masukan Terhadap Perubahan atas UU 38 tahun 2004 tentang Jalan

RDPU Komisi 5 DPR RI

Senin 14 Juni 2021

Ir. Tri Tjahjono, MSc, PhD

Universitas Indonesia



Pandangan Terhadap
Permasalahan
Pembiayaan Jalan
Daerah



Jalan Pringgabaya-Sembalun Lombok Timur – PRIM KIAT DFAT Australia

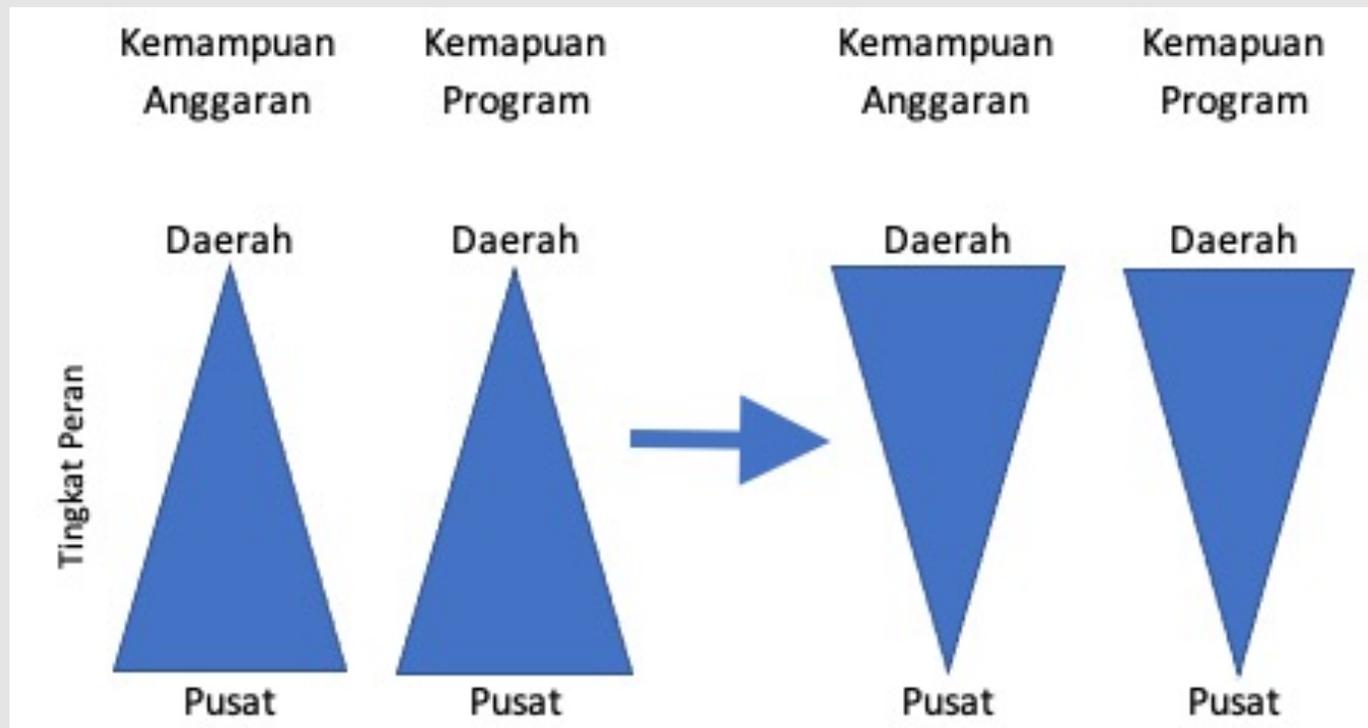
1. Pendahuluan

- Kami setuju terhadap kerangka acuan tentang jalan daerah terhadap disparitas kondisi jalan yang ada pada beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang menyebabkan kondisi jalan yang tidak layak walaupun jalan tersebut merupakan jalan kolektor utama atau sekunder.
- Kondisi ini diperparah dengan permasalahan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) dan ketidak sesuaian kelas jalan terhadap beban lalu-lintas yang melewatinya. Kondisi ini yang menyebabkan jalan di Indonesia mengalami kerusakan prematur dari umur yang direncanakan sebelum perbaikan besar dilakukan. Ketidak taatan RTRW juga dapat memicu kecepatan kerusakan jalan karena beban yang harus dipikul jalan bila Kawasan berubah dari peruntukannya.

2. Konsep Pembinaan dan Pembiayaan Jalan Daerah

- Pada hakekatnya peran pusat dan daerah sangat erat dikaitkan dengan kemampuan pendanaan (fiskal) dan kemampuan sumber daya manusia baik di sektor penyelenggaraan jalan daerah (ASN Pemerintah Daerah) maupun industri konstruksi jalan dan jembatan (kontraktor, konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan).
- Pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan daerah harus memahami kaidah-kaidah proyek yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR
- Juga harus dijaga integritas terkait korupsi, kepuasan publik dengan meningkatkan kompetensi melalui sertifikat di bidang jalan dan jembatan. Program afirmasi yang terukur harus dilakukan dengan baik.

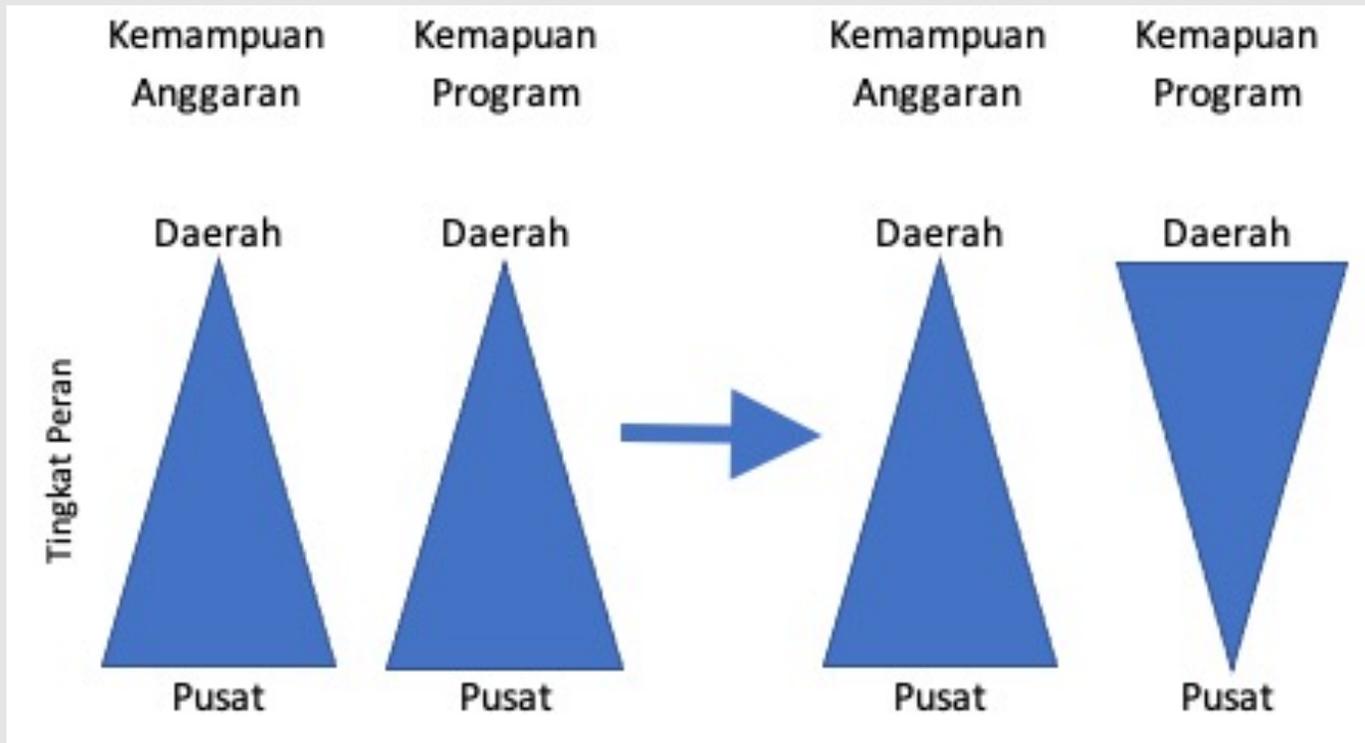
Keseimbangan Peranan Pemerintah Pusat terhadap Jalan Daerah yang diharapkan.



Target Pencapaian

- Dengan kemampuan kapasitas SDM maupun industri konstruksi di bidang jalan di daerah meningkat, maka secara bertahap program pembinaan jalan diserahkan pada daerah sehingga peran pemerintah daerah dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan lebih baik
- Demikian juga dengan semakin baiknya kondisi fiskal pemerintah daerah maka sebaiknya peran dari pemerintah pusat dapat diminimalisasi terbatas dengan bantuan fiskal berupa dana alokasi khusus berupa bantuan pembinaan jalan daerah dan untuk meningkatkan keselamatan jalan yang memang diperlukan. Khususnya untuk keselamatan jalan prioritas dilakukan untuk merubah jalan sub standar ke standar disesuaikan dengan kelas jalan ataupun perubahan kelas jalan akibat ekonomi yang lebih baik ataupun perbaikan alinyemen jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan.

Bagaimana dengan Kawasan 3 TP



Catatan: 3 TP Kawasan Terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan

Target Pencapaian

- Dengan kemampuan kapasitas SDM maupun industri konstruksi di bidang jalan di daerah meningkat, maka secara bertahap program pembinaan jalan diserahkan pada daerah sehingga peran pemerintah daerah dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan lebih baik
- Walaupun demikian kondisi 3 TP memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemerintah daerah mampu memiliki kondisi fiskal yang lebih baik sehingga peranan pendanaan tetap diperlukan.
- Di sini perlu peraturan kriteria yang terukur dengan melihat kondisi makro ekonomi daerah, sosial apakah mereka sudah tidak menjadi daerah tertinggal



PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM) PROGRAM

Mengapa PRIM?

Pada tahun 2012, hanya **61%** jalan provinsi dan **55%** jalan kabupaten yang memiliki standar, yaitu:

- Anggaran untuk pemeliharaan jalan terbatas
- Kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan pemeliharaan jalan yang efektif sangat rendah
- Kualitas dari pemeliharaan jalan masih rendah

Bagaimana alur pelaksanaan PRIM?



Program PRIM mencakup

Bantuan teknis Technical Assistance untuk meningkatkan perencanaan dan kualitas pengerjaan pemeliharaan jalan dengan kredibilitas anggaran

Mobik dengan sistem penganggaran (performance) atau kualitas pengerjaan pemeliharaan jalan

Inventarisasi kondisi pemeliharaan jalan yang lebih baik

Jenis Penanganan Jalan di PRIM

- Pemeliharaan Rutin:** Pemeliharaan rutinitas, reguler dan pemeliharaan lumpur dan kerikil
- Pemeliharaan Berkala:** Pekerjaan (overlay) untuk memperbaiki kondisi jalan karena usang/ rusak
- Rehabilitasi:** Pengambilan kembali jalan dengan melakukan perbaikan pada kondisi jalan yang tidak layak (leak)

SETIAP TAHUN **SETIAP 5 TAHUN** **SETIAP 10 TAHUN**

Pekerjaan Tertunda dan Pekerjaan Minor (Racking and Minor Works - RMW): Pekerjaan minor yang tidak memiliki anggaran khusus dan hanya penanganan pemeliharaan jalan yang lebih besar hingga maksimum 3 tahun.

Proyek Percontohan PRIM

Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pelaksanaan PRIM

Audit implementasi di NTB: 2010 Perencanaan Dimulai, 2013 Audit implementasi di NTB, 2015 Dukurasi kemajuan proyek, Desember 2018 Penyelesaian program di NTB

Tujuan dari PRIM

- Meningkatkan standar dan prosedur perencanaan, penganggaran dan pendisiplinan
- Meningkatkan kualitas proses pengendalian dan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam implementasi
- Mendorong keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pengerjaan pemeliharaan jalan

Capaian PRIM di NTB

Kualitas jalan yang lebih baik



Tahun	Akses Anggaran (Rp Milyar)	Kondisi Jalan (%)
2010	315	47
2011	224	55
2012	234	62
2013	175	69
2014	145	70
2015	480	73
2016	370	75
2017	570	77

Alasan dana yang optimal untuk pemeliharaan jalan dapat meningkatkan kondisi keselamatan jaringan jalan.

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui LKJL

Peningkatan respon atau layanan layanan jalan

Dampak

- Tersedianya akses yang lebih baik guna membuka kesempatan ekonomi
- Peningkatan keselamatan jalan
- Peningkatan kesehatan gender (KSG)

Langkah selanjutnya

Regulasi dan pengendalian PDB yang mendukung KPI, KSI, KSIK dan KSIKSIK ke daerah lain

melalui Program Nasional Wihik Jalan Daerah yang dibayai APBD



Kerjasama Indonesia Australia untuk meningkatkan SDM sektor konstruksi Perencanaan dan Pelaksanaan oleh Garuda yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui akses infrastruktur yang lebih baik untuk semua. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan di www.kiat.or.id atau www.indonesiaaustralia.org Diupdate pada tahun 2018

Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dan Dunia Konstruksi dimungkinkan di Indonesia dengan melihat success story PRIM NTB bantuan dari KIAT-DFAT Australia.

3. Program penyerta

- Hakekat dari keberhasilan jalan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena jalan daerah merupakan ujung tombak dari sentra produksi masyarakat khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Nilai investasi jalan bila diukur secara ekonomi adalah semakin baiknya kesejahteraan masyarakat karena akses mobilitas lebih baik dan pendistribusian barang juga lebih baik karena biaya logistik lebih murah.
- Kondisi biaya mahal logistik berdampak pada rendahnya nilai jual petani ataupun sektor UMKM lainnya. Tetapi bila rantai pasok tidak juga tidak diperbaiki, maka produsen kecil/UMKM tidak dapat menikmati karena efisiensi yang terjadi dinikmati oleh pihak lainnya yang seharusnya dinikmati oleh semua pihak (produsen, konsumen dan rantai pasok logistik).

Program Penyerta

- Kriteria melihat bantuan dana jalan daerah dilakukan dengan melihat perkembangan sektor transportasi dan pergudangan dalam struktur PDRB Kabupaten/kota terkait. Sektor transportasi merupakan salah satu proksi untuk analisis apakah sektor ini masih lemah atau sudah kuat relatif terhadap rata-rata seluruh kabupaten/kota provinsi yang sama.
- Di samping pendekatan kuantitatif diperlukan juga *judgement* kualitatif yang terkait dengan indikator kesejahteraan seperti PDRB per kapita, tingkat pendidikan, Kesehatan (dalam bentuk IPM) serta tingkat pengangguran dan sebagainya sebagai proksi untuk estimasi potensi aktivitas masyarakat. Faktor lainnya yang lebih nyata adalah bertambahnya produksi lokal kemasyarakatan termasuk destinasi wisata desa dan alam.
- Pengendalian terhadap ODOL harus dilakukan untuk menghindari pengguna yang tidak bertanggung jawab. Kendaraan pengangkutan galian dan material bangunan harus diawasi dengan baik bila pemda tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat

Terima Kasih

